



1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau 2023 merupakan dokumen perencanaan komprehensif tahunan yang memuat Rencana Kerja yang akan dijalankan oleh OPD untuk mencapai visi, misi dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.

Untuk mencapai sasaran program seperti tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Strategis OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2021-2026. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) OPD yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berupa dana yang dibutuhkan oleh OPD untuk mencapai sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Salah satu prioritas program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Berau 2021-2026 pada sub sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Renja OPD merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.



Penyusunan Renja ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya Renja ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja ini disusun atas dasar wewenang yang tertuang dalam perundang-undangan, Keputusan, Instruksi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Landasan hukum dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategis ini yang antara lain terdiri:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



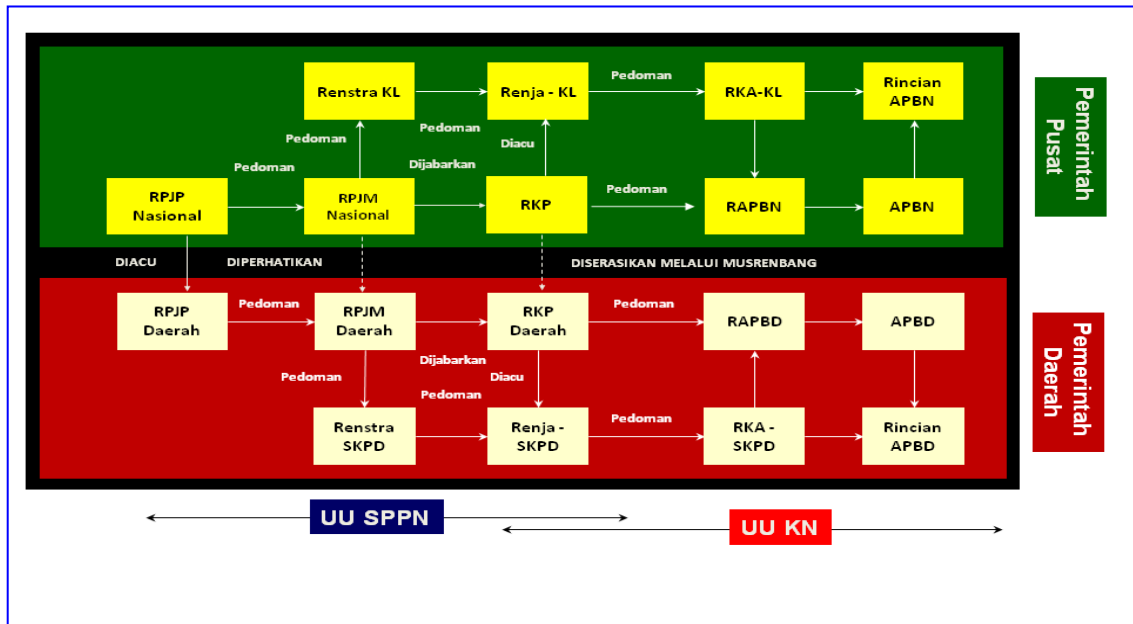
- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2001 tentang pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4124
 10. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 13. SK Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan LKj-IP.

Selain perujukan terhadap seluruh produk hukum di atas, Renja Daerah ini juga disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen lain, baik yang diterbitkan oleh seluruh unit instansi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten maupun oleh Pemerintah Propinsi dan instansi sektoral pusat. Perujukan dimaksud sangat diperlukan untuk menjaga agar setiap kebijaksanaan maupun gerak langkah operasional lima tahun dan tahunan daerah tetap berada dalam koridor perencanaan strategis yang lebih luas sehingga mampu menjawab kebutuhan tuntutan perubahan keadaan.



1.3 Kedudukan dan Peranan Renja SKPD Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Keterkaitan antara Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dengan RPJM Nasional, RPJP Daerah dan RPJM Daerah dijelaskan pada gambar ini :



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau;

- Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;



- d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau dalam satu tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja.

1.4.2 Tujuan

- a. Menyediakan suatu tolak ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau;
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.5 Sistematika Penulisan

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan merupakan langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategik, nasional, dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau merancang rencana strategik secara bersama-sama dengan segenap jajarannya untuk diimplementasikan bersama dalam rangka pencapaian tujuan.

Perumusan rencana strategik mengikuti tahapan mulai dari idealistik-kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.



Penyajian rencana strategik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan perencanaan strategik, landasan hukum penyusunan Renja, kedudukan dan peranan Renja SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah , struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kelengkapan, tugas pokok dan fungsi, sistem, prosedur dan mekanisme Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja

Menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022, Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 dan Analis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bab III Isu Strategis, IDentifikasi Masalah, Tujuan dan Sasaran

Mengungkapkan Isu-isu Strategis serta Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV Program dan Kegiatan

Menguraikan program yang akan dilaksanakan selama tahun 2023

Bab V Penutup

Mengungkapkan uraian singkat rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau

Pada akhir pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yang tertuang dalam program dan kegiatan.

Keberhasilan program dan kegiatan dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangannya. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan anggaran APBD. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan Laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas Laporan Keuangan.

6 (enam) Program dan 21 (dua puluh satu) Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja dan realisasi APBD sangat baik yaitu mencapai 91 %. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output. Input terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 seperti pada Table 2.1

Sedangkan untuk tahun 2023 dikarenakan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berbeda maka Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 .



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.850.158.875	7.026.693.494	90%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.317.000	206.115.786	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.917.000	75.746.200	98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	62.400.000	61.684.586	99%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000	68.785.000	98%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.059.313.625	5.322.427.321	88%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.245.797.081	4.525.719.777	86%
	Penyediaan administrasi pelaksanaan	813.516.544	806.707.544	99%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.000.000	127.499.062	90%
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	59.500.000	49.206.000	83%
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	82.500.000	78.293.062	95%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.507.400	641.826.750	97%
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.997.400	11.981.000	100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	309.899.700	295.520.500	95%



Rencana Kerja Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau

	Penyediaan Peralatan rumah tangga	14.301.600	13.366.000	93%
	Penyediaan bahan logistik kantor	89.988.000	89.890.000	100%
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	20.620.700	18.499.250	90%
	Penyediaan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5.000.000	4.880.000	98%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	207.690.000	207.690.000	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.892.200	298.105.002	97%
	Pengadaan Mebel	21.000.000	20.859.375	99%
	Pengadaan kendaraan dinas oprasional atau lapangan	88.022.800	87.500.00	99%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnnya	44.839.400	42.160.000	94%
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	153.030.000	147.585.627	96%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.297.800	218.583.273	95%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.297.800	3.246.100	76%
	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	225.000.000	215.337.173	96%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.830.850	202.036.300	83%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	145.082.850	130.468.500	90%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnnya	15.000.000	9.600.000	64%



Rencana Kerja Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau

	Pemeliharaan mebel	28.750.000	28.700.000	100%
	Pemeliharaan/rehabilitas Gedung kantor dan bangunan lainnya	54.998.000	33.267.800	60%
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	340.000.000	284.178.054	84%
	Penyusunan Tenaga Kerja (RTK)	340.000.000	284.178.054	84%
	Penyusunan tenaga kerja makro	170.000.000	141.601.630	83%
	Penyusunan tenaga kerja mikro	170.000.000	142.576.424	84%
3	PROGRAM PELARIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.626.739.672	1.498.282.568	92%
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	1.263.579.936	1.175.038,325	93%
	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1.215.979.136	1.139.081.270	94%
	Kordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	47.600.000	35.957.055	76%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000	41.011,902	82%
	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	50.000.000	41.011.902	82%
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	148.939.736	132.217.740	89%
	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	148.939.736	132,217.740	89%
	Konsultasi Produktifitas Pada Prusahaan Kecil	72.240.000	63.227.581	88%



Rencana Kerja Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau

	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	72.240.000	63.227.581	88%
	Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.980.000	86.787.020	94%
	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	91.980.000	86.787.020	94%
4	PROGRAM PENETAPAN TENAGA KERJA	1.402.477.996	1.273.217.847	91%
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	813.066.724	734.666.904	90%
	Pelayanan antar kerja	142.799.172	134.903.925	94%
	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	166.787.552	140.836.993	94%
	Perluasan kesepakatan kerja	503.480.000	458.925.986	91%
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82.500.000	71.292.151	86%
	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	82.500.000	71.292.151	86%
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	313.369.272	284.182.029	91%
	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	177.799.272	175.723.332	99%
	Job fair atau bursa kerja	135.570.000	108.458.697	80%
	Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	78.542.000	108.458.697	91%
	Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	78.542.000	71.374.562	91%



Rencana Kerja Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau

	Penerbitan perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	111.702.201	97%
	Kordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 daerah kabupaten/kota	115.000.000	111.702.201	97%
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRI	1.129.586.624	1.102.152.064	98%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Daerah Kcamatan/kota	292.798.672	267.948.235	92%
	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	150.000.000	131.934.904	88%
	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	142.798.672	136.013.331	95%
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	836.787.952	834.203.829	100%
	Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	150.000.000	131.934.904	88%
	Pengesahaan peraturan perusahaan	142.798.672	136.013.331	95%
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	836.787.952	834.203.829	100%
	Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada	136.787.952	136.053.452	99%



Rencana Kerja Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau

	kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
	Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota	330.000.00	329.068.662	100%
	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha , federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	140.000.00	139.638.699	100%
	Pelaksanaa Operasional Lembaga Kerjasama tripartite daerah kabupaten/kota	230.000.000	229.443.016	98%
6	program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	196.427.204	192.226.904	98%
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 Daerah Kabupaten/Kota	196.427.204	192.226.904	98%
	Kordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota	96.147.852	93.609.052	97%
	Penyuluhan transmigrasi	100.279.352	98.617.852	91%
	Jumlah	12.545.390.371	11.376.750.931	91%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau menetapkan indikator kinerja periode 2021-2026 sebagai tolak ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.



Rencana Kerja Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau

Table 2.2

Target dan Capaian Sasaran Kinerja dan Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Program Prioritas Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi Tahun 2022		Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2022						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Berau sampai Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2022)			
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	80	8.142.293.818	78	413.649.518	70	1.284.072.000	0	41.838.076	32	6.404.400.038	16	341.397.391	32	1.051.003.063	80	7.838.638.568	158	8.252.288.086
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Lokal yang ditempatkan	35	16.368.340.000	28	110.190.000	25	2.475.000.000	7	80.333.787	12	140.609.253	5	108.132.479	10	399.565.503	34	728.641.022	48	838.831.022
Program Hubungan Industrial	Persentase Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	4.030.880.000	82	652.400.000	100	600.000.000	6	37.217.276	14	95.656.514	6	43.363.488	10	180.477.828	36	356.715.106	108	1.009.115.106



Indikator capaian kinerja Disnakertrans dari tahun 2022 terdiri dari: (9 indikator), yang dijabarkan sbb:

2.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 70 dan terealisasi sebesar 65,55.

2.2.2 Pencari Kerja Yang Kompeten

Pencari kerja yang memperoleh pelatihan ketrampilan merupakan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Besaran pencari yang memperoleh pelatihan ketrampilan merupakan indikator SPM bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja. Secara nasional, batas waktu pencapaian indikator ini adalah Tahun 2022 dengan target sebesar 80 orang dan target yang ditetapkan Kabupaten Berau pada awal periode RPJMD (Tahun 2022) sebesar orang Sedangkan realisasinya adalah 110 orang .

2.2.3 Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan merupakan besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan merupakan indikator SPM bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan tercatat. Target RPJMD di Tahun 2022 adalah 4,87 % sedangkan realisasinya 34 %.

2.2.4 Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas yang memperoleh pelatihan lanjutan pada Tahun 2022 Sebanyak 30 Orang , yaitu 15 orang mengikuti Pelatihan Design Grafik dan 15 orang lagi mengikuti Pelatihan Hidroponik.



2.2.5 Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah, pada tahun 2022 menargetkan 100 Kasus terselesaikan, namun terealisasi hanya sebanyak 35 Kasus Perjanjian Bersama. Dari 67 kasus perselisihan terdapat 39 kasus Perselisihan PHK dan 52 orang Tenaga Kerja ter PHK, sedangkan Perjanjian bersama sebanyak 35 Kasus.



BAB III

ISU STRATEGIS, IDENTIFIKASI MASALAH, TANTANGAN, TELAAHAN SERTA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Situasi perekonomian mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap bidang ketenagakerjaan melalui penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran. Perlu dilakukan iklim investasi yang kondusif untuk bisa membuka dan memperluas lapangan pekerjaan.

Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional (instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan) serta non struktural non fungsional merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Namun disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat



terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.

Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat Desa menjadi persoalan tersendiri.

Pada akhirnya pengangguran masih relatif tinggi, apalagi kalau yang dibicarakan adalah kelompok setengah penganggur. Di sini dapat diartikan bahwa banyak tenaga kerja yang bekerja tetapi tetap miskin karena produktivitasnya rendah atau penghasilannya kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan / hambatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Berau sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Situasi perekonomian yang tidak kondusif mempunyai pengaruh langsung terhadap terhambatnya penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran.
2. Informasi pasar tenaga kerja belum optimal
3. Daya saing Tenaga Kerja masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, sehingga belum mampu bersaing baik di dalam maupun di Luar Negeri. Selain itu masih terjadi miss match antara dunia pendidikan dan dunia industri.
4. Produktivitas tenaga kerja kurang
5. Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur yang belum memadai untuk kebutuhan industri.



3.2 Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan

Penentuan Isu-isu Strategis

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dan pengangguran dalam strategi yang dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran adalah dengan mencermati Instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.



Guna menurunkan jumlah penduduk miskin serta pengurangan pengangguran, disusunlah strategi pembangunan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman maupun peluang (SWOT) dalam menjalankan strategi tersebut

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Berau dari berbagai aspek dan berdasarkan Analisis SWOT, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Ketenagakerjaan Kabupaten Berau. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Kerja satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten sebagai berikut:

1. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.
2. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
3. Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha

Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi.

3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai dengan visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Terwujudnya tenaga kerja dan transmigran yang berkualitas, produktif dan sejahtera maka capaian dari program dan kegiatan di Disnakertrans mendorong terwujudnya visi Bupati Berau untuk mewujudkan masyarakat Berau yang sehat, cerdas dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan,



nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Artinya visi yang dituangkan dalam misi dan dilaksanakan dalam program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau bersinergi terhadap visi misi Bupati dan terhadap pencapaian visi nasional yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong khususnya misi nasional yaitu Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan.

Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan.



Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (*open unemployment*) merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan sebaliknya merupakan penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi

3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan ketenagakerjaan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD



dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau , seperti tersaji dalam Tabel 2.4

Table 2.4

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Program Pelatihan dan Produktivitas				
1	Pelatihan Tata Boga	Tanjung Redeb	Orang	16	
2	Pelatihan Menjahit	Tanjung Redeb	Orang	16	
3	Pelatihan Otomotif	Tanjung Redeb	Orang	16	
4	Pelatihan Teknisi Komputer	Tanjung Redeb	Orang	16	
5	Pelatihan Las	Tanjung Redeb	Orang	16	
	Program Penempatan Tenaga Kerja/ Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja				
1	Pelatihan Hidroponik	Maratua	Orang	20	
2	Pelatihan Hidroponik	Biduk-biduk	Orang	20	

3.6 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda dan sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, Pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang, dan pembangunan wilayah demi terwujudnya Visi dan Misi pembangunan nasional.

Pembangunan Ketenagakerjaan dalam kerangka Agenda Pembangunan Nasional 2021-2026 dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Agenda prioritas menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara melalui perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri. Sasaran lainnya adalah :
 - 1) Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran;
 - 2) Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
 - 3) Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran;



- 4) Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran;
- b. Agenda prioritas meningkatnya produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional yang dilakukan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, memiliki sasaran;
 - 1) Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja melalui pelaksana pelatihan tenaga kerja serta dengan memperbesar proporsi jumlah tenaga kerja kompeten dan diakui secara nasional dan internasional melalui serangkaian proses sertifikasi untuk tenaga kerja berkeahlian tinggi.
 - 2) Meningkatkan kinerja lembaga pelatihan milik pemerintah untuk menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi .
 - 3) Mengembangkan standar kompetensi regional (regional competency standar frame work), untuk sektor jasa yang diprioritaskan dalam masyarakat ekonomi ASEAN;
 - 4) Penerapan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan pengakuan, khususnya lembaga pemerintahan;
 - 5) Tersusunya peraturan Pemerintah dalam rangka pembentukan lembaga independen pengelolaan dana pengembangan pelatihan;
 - 6) Tersusunya peta kompetensi industri untuk bidang dan sektor jasa konstruksi, transportasi, pariwisata, industri penelolaan, pertanian-perikanan , industri kreatif, jasa logistik, teknologi komunikasi dan informasi, (e-ASEN), jasa kesehatan, jasa pendidikan dan sektor energi, mineral dan kelistrikan.
 - 7) Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di tingkat internasional;

Sasaran Utama pembangunan bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai, adalah:



- a. Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten berau diperkirakan sebesar antara 5.02 pada tahun 2022 dan diharapkan bisa menurun ditahun 2023.
- b. Memfasilitasi Penciptaan kesempatan kerja sebesar 30 Ribu (selama 5 tahun)

Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di tempuh langkah langkah kongkrit untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang berkualitas di antaranya:

- a. Meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan memberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup;
- b. Meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif;
- c. Transformasi struktur tenaga kerja dan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah *low – skilled industries* menjadi *skill based industries*;

Memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja yang besar (padat pekerja) dan bagi pelaku pada usaha kecil menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercipta bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih baik dan tingkat dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor –sektor pembangunan.

3.7 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten



Berau sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan misi Rencana Startegis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2021-2026.

Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yaitu:

“Mewujudkan Tenaga Kerja yang Terampil/ Kompeten dan Produktif yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi “

Sebagaimana Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yang tersebut diatas, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
2. Meningkatnya Keterampilan/ Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Kerja.
3. Meningkatnya Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif dan kesejahteraan Pekerja.
4. Meningkatnya Kontribusi Transmigrasi terhadap PDRB.

Misi pembangunan Kabupaten Berau yang sesuai dengan urusan adalah misi Pertama yakni ***“Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja”***

3.7.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Berau 2021-2026 maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor ketenagakerjaan tahun 2023 yaitu:



1. Mengurangi angka pengangguran
2. Meningkatnya Informasi Pasar Kerja, Bursa Kerja, serta Perluasan Kesempatan Kerja.
3. Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis.

3.7.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor ketenaagakerjaan tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Peningkatan Kesempatan Kerja

Table 2.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten berau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja Lokal yang berkompeten	Pencaker Terlatih	100	110	110	110	110	120
2	Mengurangi Angka Pengangguran	Meningkatkan Jumlah Lapangan Pekerjaan	Angka pengangguran	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87	4.87

3.7.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Berau merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang



termuat dalam Rencana Strategis supaya efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Table 2.6

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelatihan Kompetensi, keterampilan kerja, Memperluas lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan Pelayanan	Meningkatkan daya saing Tenaga Kerja, Penempatan tenaga kerja dan menciptakan wirausaha dan pembinaan transmigrasi.
Menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Meningkatkan perlindungan, Pencegahan Perselisihan, dan Mogok kerja.



BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan 5 (Lima) program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.781.269.073
	Perncanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.091.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.211.156.273
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.250.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.980.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	530.813.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.978.000
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	149.999.200



	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	149.999.200
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.450.747.800
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.219.246.800
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	55.000.000
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	76.211.600
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	41.439.800
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.849.600
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	837.888.400
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	389.220.000
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.670.600
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	243.679.800
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	33.818.000
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	97.500.000
5	Program Hubungan Industrial	709.468.800
	Pengeasahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	196.599.400
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	512.869.400
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	190.867.600
	Penataan Pesebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	190.867.600
7	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	50.120.000
	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandiran	50.120.000
Jumlah		9.929.373.273



Perencanaan Kerja (*Job Planning*) sebagai salah satu metode perencanaan yang saat ini banyak digunakan dalam masyarakat merupakan suatu pendekatan yang berkembang dalam konsep manajemen strategis (*strategic management*). Masyarakat modern dengan karakteristik perubahan lingkungan yang begitu cepat membutuhkan suatu cara pengelolaan kehidupan yang mempunyai kapabilitas adaptif dan memungkinkan kelompok masyarakat melakukan *Positioning* dirinya secara tepat sehingga mampu meraih keberhasilan dalam dunia yang makin kompetitif.

Perencanaan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau untuk tahun anggaran 2023 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau menetapkan visi dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau, dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan.

Enam misi terjabar dalam 9 (sembilan) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam 9 kebijakan yang tercermin pada 7 (Tujuh) program.

Dengan disusunnya Renja tahun 2023, diharapkan dapat mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya secara efisien dan efektif menuju pada terciptanya suatu “good governance”.



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau 2023 merupakan untuk mencapai visi, misi dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.

Penyusunan dokumen perencanaan ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJDM) Kabupaten Berau. Dengan adanya keterkaitan dengan perencanaan yang lebih tinggi. Akan terjadi keserasian dalam pelaksanaan perencanaan yang ada dan memudahkan dalam pembiayaan untuk program-program yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.

Renja OPD merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Penyusunan Renja ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya Renja ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, Februari 2023

Kepala Dinas,

Drs. H. Masrani, M.Si
NIP. 196305061986011004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	14
BAB III ISU STRATEGIS, IDENTIFIKASI MASALAH, TANTANGAN, TELAAHAN SERTA TUJUAN DAN SASARAN	18
3.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	18
3.2 Identifikasi Permasalahan	20
3.3 Dampak terhadap Visi dan Misi.....	21
3.4 Tantangan dan Peluang.....	22
3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
3.6 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.7 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	26
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN.....	30
BAB V PENUTUP	32